

SISTEM TERINTEGRASI UNTUK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN WILAYAH BERBASIS KAMPUNG

Zaidir¹, Indra Listiawan²

^{1,2} Prodi D3 Teknologi Informasi Universitas Respati Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto No.KM 6,3, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
email: zaidirtan@gmail.com¹, indra.unriyo@yahoo.com²

Abstract

Development planning in the village begins with the Development Planning Conference. The government considers the need for solutions in solving development problems to the village and village level so that on November 7, 2018 the Yogyakarta Mayor Regulation No. 72 of 2018 was issued concerning the formation of village administrators so that development would no longer be based on RT-RW but based on village. The many functions of village administrators require an appropriate system for processing data. Managing data manually has weaknesses, especially in budget planning and control. The purpose of this study is to produce an integrated system for planning and controlling village-based area development. The research method used consisted of literature study, data collection and system development of the Waterfall method. The results of this study have been tested in the Klitren Yogyakarta sub-district, which is capable of processing data on budget proposals until reporting and can present varied information to village administrators, LPMK and Kelurahan.

Keywords: *Integrated System, Musrenbang, Kampung*

Abstrak

Perencanaan pembangunan di kelurahan diawali dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Pemerintah memandang perlu adanya solusi dalam pemecahan masalah pembangunan sampai tingkat kelurahan dan kampung sehingga pada tanggal 7 November 2018 terbitlah Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 72 tahun 2018 tentang pembentukan pengurus kampung agar pembangunan tidak lagi berdasarkan RT-RW tapi berbasis kampung. Banyaknya fungsi pengurus kampung, memerlukan sistem yang tepat untuk pengolahan datanya. Pengolahan data secara manual memiliki kelemahan terutama dalam perencanaan dan pengendalian anggaran. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sistem terintegrasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah berbasis kampung. Metode penelitian yang digunakan terdiri atas studi pustaka, pengumpulan data dan pengembangan sistem metode Waterfall. Hasil penelitian ini telah diujicobakan di kelurahan Klitren Yogyakarta, yang mampu melakukan pengolahan data usulan anggaran sampai pelaporannya serta dapat menyajikan informasi yang bervariasi bagi pihak pengurus kampung, LPMK dan Kelurahan.

Kata Kunci: *Sistem Terintegrasi, Musrenbang, Kampung*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Perencanaan pembangunan pada UU itu diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Definisi itu kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan kegiatan saja tidaklah cukup pada kegiatan pembangunan, jika tidak didampingi dengan pengendaliannya. Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan diatur dengan PP 39/2006, yang perlu diterapkan untuk menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan melaksanakan siklus manajemen pembangunan secara utuh.

Pembangunan daerah dengan skala yang lebih kecil yaitu pembangunan di desa atau kelurahan. Perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan diawali dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kegiatan ini dikoordinir oleh Lurah dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Tahapan musrenbang dilalui dengan menerima usulan-usulan dari RT dan RW dengan mengisi form usulan kegiatan bidang fisik dan bidang non fisik. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan perencanaan anggaran dan monitoring serta evaluasi diantaranya adalah para RT dan RW masih sangat egosentris untuk wilayah masing-masing. Dampak yang ditimbulkan dari kondisi yang demikian adalah sebaran pembangunan tidak merata dan banyak mata anggaran yang tumpang tindih antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Pemerintah melalui walikota Yogyakarta memandang perlu adanya solusi dalam pemecahan masalah pembangunan sampai tingkat kelurahan agar tidak terjadi lagi ego ke RW-an. Pada tanggal 7 November 2018 terbitlah Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 72 tahun 2018 tentang pembentukan pengurus kampung. Adanya pengurus kampung, maka basis pembangunan tidak lagi berdasarkan RT-RW. Pengurus kampung adalah mitra kerja dari LPMK dan Kelurahan dengan tugas menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan serta mengendalikan pembangunan berbasis kampung. Banyaknya fungsi yang diemban oleh pengurus kampung, khususnya pengkoordinasian perencanaan pembangunan kampung, membutuhkan kehati-hatian sehingga diperlukan sistem yang tepat untuk pengolahan datanya. Pengolahan data secara manual tentu memiliki banyak kelemahan, misalnya pengisian form yang butuh waktu lama, melakukan proses rekap tiap kampung dan melakukan kompilasi semua unit atau kampung yang sering salah dan tumpang tindih. Informasi yang dibutuhkan juga tidak tersedia dengan cepat, akurat dan memenuhi kebutuhan.

Penelitian terkait sistem informasi terintegrasi atau bidang perencanaan dan pengendalian anggaran diantaranya (Kurniawan & Chazar, 2016) mengatakan bahwa organisasi membutuhkan sebuah arsitektur enterprise dalam menjalankan proses bisnis di dalamnya. Penelitian ini menghasilkan sebuah cetak biru arsitektur enterprise untuk pembangunan sistem informasi terintegrasi yang berjalan dalam aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat menampilkan arsitektur data, aplikasi, dan teknologi yang dibutuhkan dalam menjalankan proses bisnis enterprise. (Husaini, 2016) mengatakan bahwa untuk menjamin pengembangan sistem informasi terintegrasi di PT. Peksi Gunaraharja divisi pakan ternak menjadi alat untuk mencapai keunggulan kompetitif organisasi. Kajian pengembangan sistem informasi terintegrasi menghasilkan: portofolio aplikasi, kerangka kerja pengembangan portofolio aplikasi potensial, metode pengembangan sistem informasi, usulan pengembangan sistem informasi dan rekomendasi pengamanan sistem. (Sunardi, Utami, & Sudarmawan, 2017) mengatakan bahwa roadmap penelitian disusun dengan mempertimbangkan portofolio sistem informasi, ketersediaan sumber daya manusia di bidang sistem informasi dan dukungan anggaran pengembangan sistem informasi di Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB). (Badri, 2016) mengatakan bahwa pembangunan pedesaan mengalami perubahan signifikan sejak digitalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Teknologi media hibrida terbukti mempermudah desa-desa inovatif membangun jejaring dan memberdayakan komunitasnya guna mempersempit kesenjangan TIK, salah satunya melalui Gerakan Desa Membangun (GDM). (Hidayatullah, Wardani, & Rachmadi, 2018) menyatakan bahwa kampung Batik Jetis membutuhkan portal informasi berbasis website profil dengan tujuan menampilkan seluruh informasi kampung batik untuk masyarakat. Pengembangan *website* menggunakan pendekatan *object-oriented analysis and design* dimana tiap-tiap kebutuhan dikelompokkan dalam beberapa objek. Solusi untuk minimnya media pengenalan Kampung Batik Jetis adalah dengan pengembangan website profile. (Muzaki, Yuliani, & Farida, 2017) melakukan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program Alokasi Dana Kampung (ADK). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan program ADK di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik. Faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu komunikasi, disposisi, struktur birokrasi telah berjalan dengan baik, namun ada kendala pada sumber daya. (Puspitarini, 2018) melakukan penelitian untuk menganalisis efektifitas Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Akrual (SIRKA) pada proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Situbondo. Hasil analisis data membuktikan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi mempengaruhi kepuasan pengguna SIRKA dan net benefit. Hal ini berarti bahwa kualitas sistem yang diukur melalui kemudahan pengoperasian, keandalan,

waktu respon, integritas, aksesibilitas, dan kualitas output sangat membantu efektifitas penyusunan anggaran sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. (Jamall, Anam, & Djirimu, 2016) menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sangat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam proses perencanaan pembangunan serta menyediakan dokumen perencanaan secara cepat, akurat dan berkualitas. (Rozi & Listiawan, 2017) menyatakan bahwa pengelolaan administrasi dan arsip yang konvensional harus diubah menjadi berbasis sistem dan digital. Desa perlu mempublikasikan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi tentang desa, disamping perlu untuk melakukan transparansi publik.

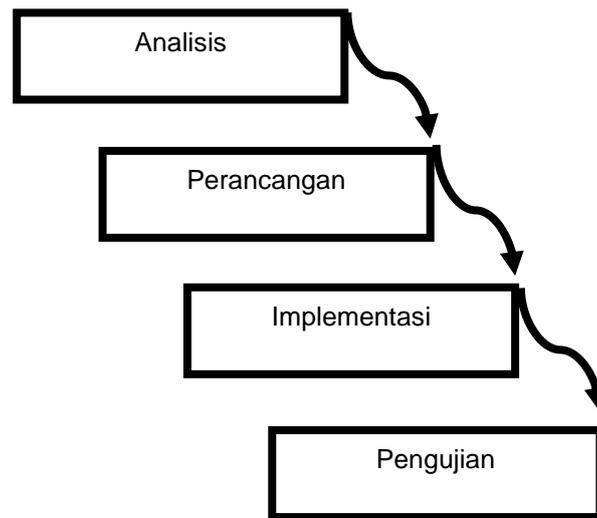
Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan suatu solusi yaitu dengan membangun sistem terintegrasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah. Walaupun penelitian yang mirip sudah banyak dilakukan, Sistem Terintegrasi untuk Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Wilayah Berbasis Kampung masih cukup menarik untuk diteliti. Perbedaan penelitian yang diusulkan dengan penelitian yang telah ada yaitu dari segi konsep orientasi alur pengolahan data dan pembagian hak akses diantara pihak-pihak pengguna sistem serta tingkat ketersediaan informasi yang lebih banyak dengan hipotesis: 1) menghasilkan sistem terintegrasi dapat dilakukan dengan melakukan sinkronisasi antar unit terkait dalam sistem yang diwujudkan dalam sebuah *database* utama sebagai pegelolaan data dan informasi, 2) melayani banyak pengguna dan menyajikan informasi yang lebih banyak dengan segala variasinya merupakan keunggulan dari sistem yang diteliti.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu penentu keberhasilan penelitian, karena dapat menyajikan tata cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berarti menggunakan pendekatan deskriptif, maknanya adalah data yang dikumpulkan bukan berupa angka, misalnya data dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen lainnya. Desain penelitian yang dipakai adalah studi kasus, dengan tujuan agar dapat menggali masalah secara spesifik dan mendalam.

Data yang dibutuhkan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui pengumpulan data. Proses pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, diskusi terfokus dan kearsipan/analisis dokumen. Observasi dilakukan di kantor kelurahan Klitren yang menjadi pusat kegiatan pengurus kampung, LPMK dan Lurah. Wawancara dilakukan kepada semua ketua pengurus kampung, kepada ketua LPMK, Lurah dan beberapa ketua RW. Diskusi terfokus dilakukan dengan mengajak pengurus LPMK dan pengurus kampung untuk membicarakan kondisi sistem saat ini dan rencana pengembangannya. Kearsipan/analisis dokumen mempelajari dokumen yang terkait hasil musrenbang kelurahan yang pernah ada. Arsip awal adalah form pengajuan masing-masing RT dan RW. Arsip selanjutnya adalah hasil kompilasi pengajuan seluruh RT dan RW. Arsip utama adalah dokumen anggaran yang disetujui serta dokumen laporan pertanggungjawaban.

Metode pengembangan sistem yang digunakan menggunakan metode Waterfall, terdiri atas: analisis, perancangan, implementasi dan pengujian seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Metode Waterfall

2.1. Analisis Sistem

Analisis didasarkan atas temuan-temuan yang dilakukan pada saat proses pengumpulan data. Hasil dari proses analisis sistem ini adalah rumusan kelayakan sistem dan rumusan kebutuhan sistem.

2.2. Perancangan Sistem

Perancangan sistem didasarkan pada hasil analisis sistem yang telah dilakukan. Perancangan yang dilakukan adalah perancangan model/proses, perancangan basis data, perancangan *input* dan perancangan *output*.

2.3. Implementasi Sistem

Implementasi merupakan langkah untuk merealisasikan hasil rancangan yang telah dihasilkan dan mendapat persetujuan dari pengguna sistem. Implementasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL.

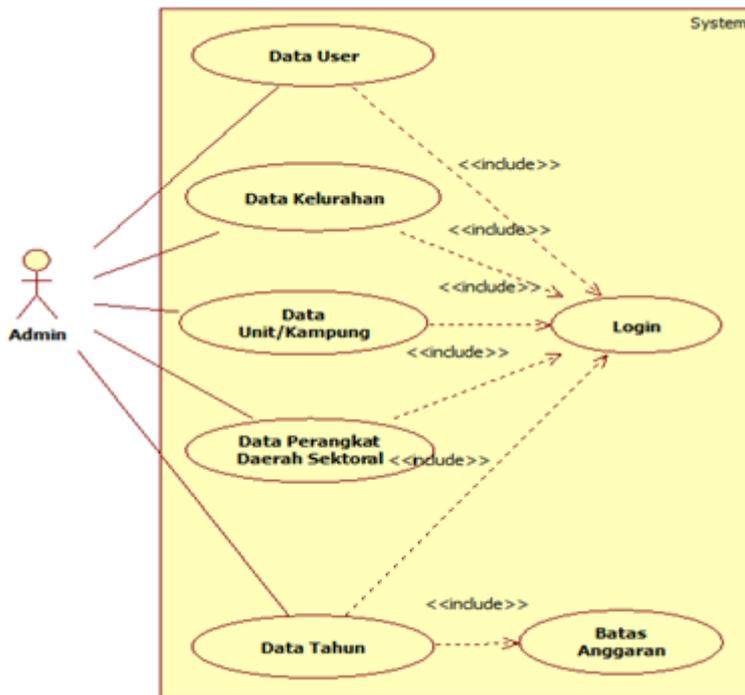
2.4. Pengujian Sistem

Pengujian yang dilakukan terhadap sistem adalah pengujian unit, pengujian modul, pengujian sistem dan pengujian integrasi sistem. Metode yang digunakan adalah *blackbox test*, *whitebox test* dan *alpha test*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

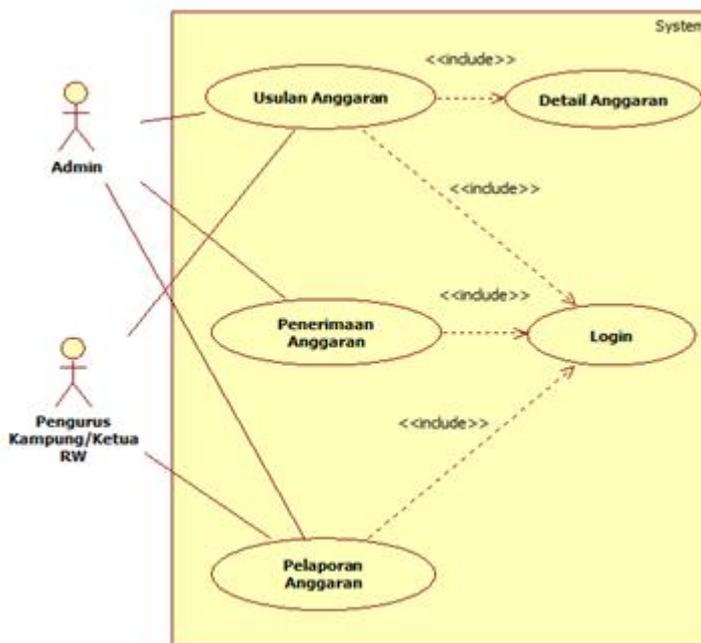
Berdasarkan proses pengumpulan data terutama dokumen musrenbang hasil kompilasi yang dilakukan oleh pihak LPMK maupun Kelurahan, tersusun rancangan fungsionalitas sistem yang disajikan dalam bentuk *use case diagram*.

Use case diagram pengolahan data induk terdiri atas 5 (lima) yaitu pengolahan data *user*, pengolahan data kelurahan, pengolahan data unit/kampung, pengolahan data perangkat daerah sektoral dan pengolahan data tahun anggaran yang di dalamnya termasuk batasan anggaran tiap tahunnya. Fungsi-fungsi tersebut bisa diakses dengan terlebih dahulu melakukan proses login, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Use Case Data Induk

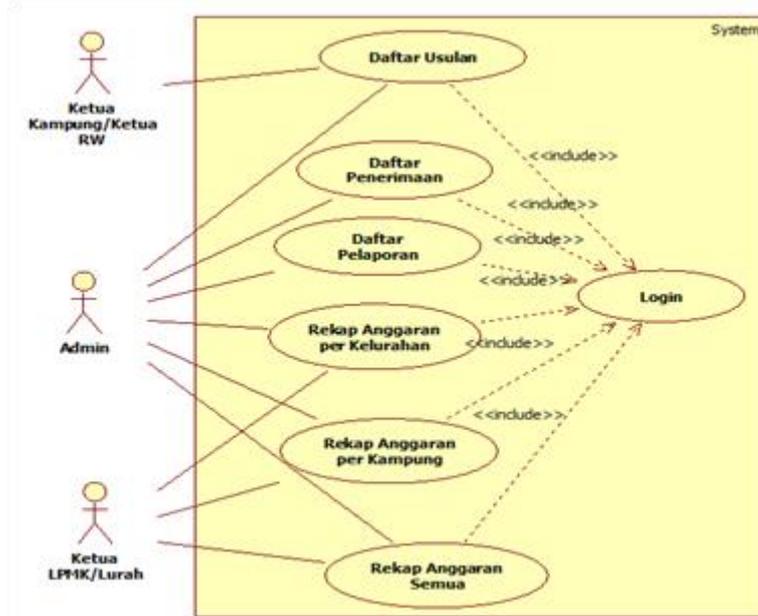
Use case diagram untuk transaksi terdiri atas 3 (tiga) yaitu usulan anggaran yang di dalamnya termasuk rincian anggaran, penerimaan anggaran dan pelaporan anggaran. Fungsi-fungsi tersebut bisa diakses dengan terlebih dahulu melakukan proses login, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Use Case Transaksi

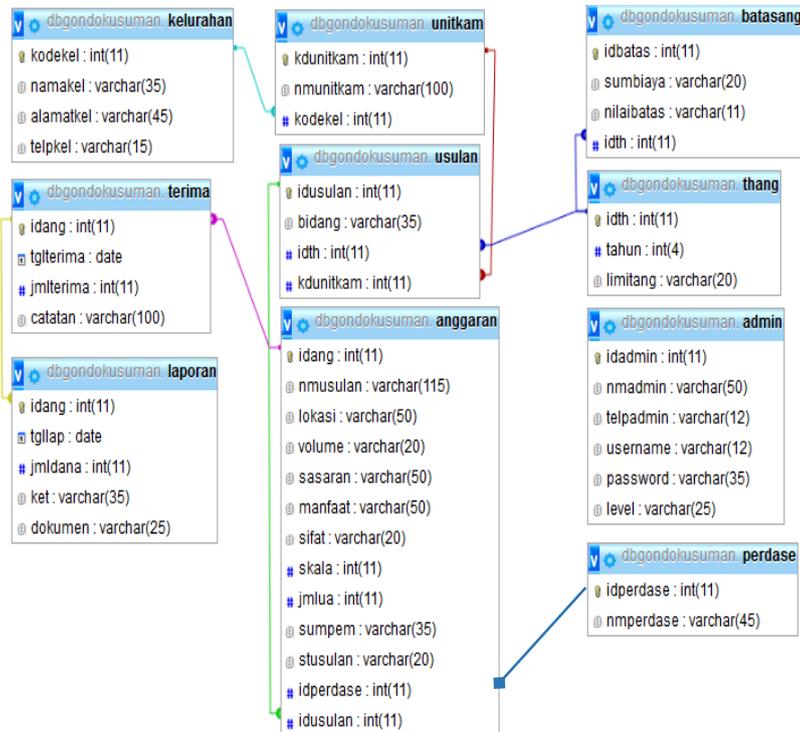
Use case diagram laporan terdiri atas 6 (enam) yaitu daftar usulan, daftar penerimaan, daftar pelaporan, rekap anggaran per kelurahan, rekap anggaran per kampung dan rekap anggaran

semuanya. Fungsi-fungsi tersebut bisa diakses dengan terlebih dahulu melakukan proses login, seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Use Case Laporan

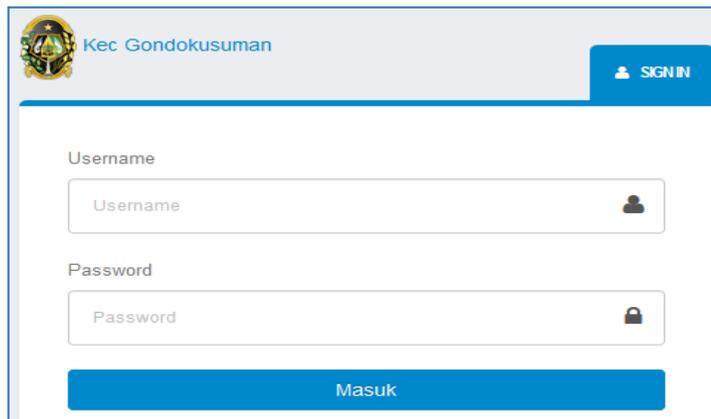
Fungsionalitas sistem yang disusun di atas bisa diwujudkan dengan dukungan basis data yang memadai agar data bisa masuk dengan mudah dan informasi dihasilkan dengan cepat dengan berbagai variasinya. Ada 10 (sepuluh) tabel yang dihasilkan untuk membentuk *database* dari sistem ini seperti terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Relasi Antar Tabel

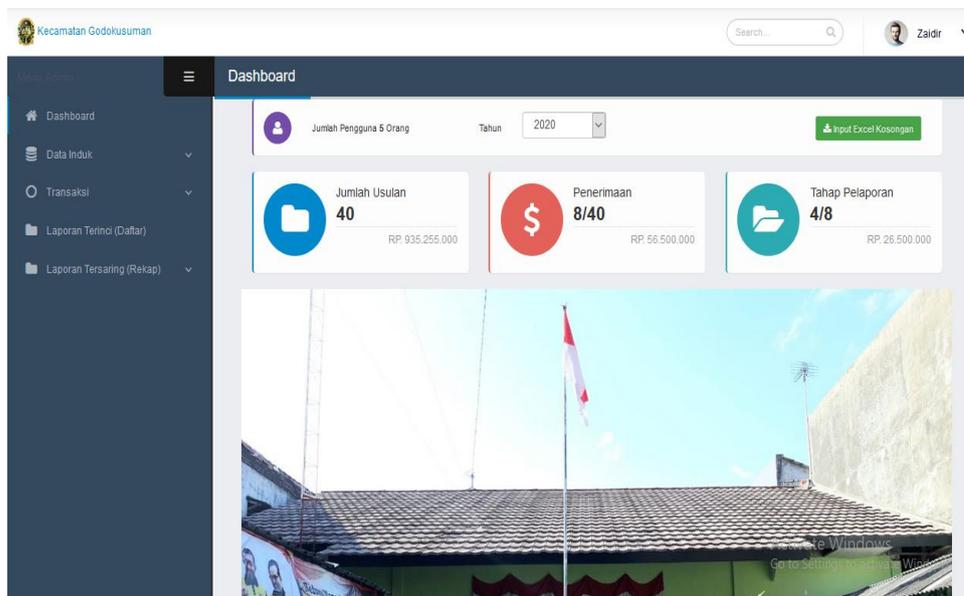
Implementasi dari sistem, diwujudkan dalam bentuk antar muka (*interface*) yang dibangun menggunakan PHP dan MYSQL serta dukungan *framework Bootstrap*. Antar muka aplikasi yang pertama ditampilkan adalah login seperti terlihat pada Gambar 6.

Proses login digunakan untuk menjaga aplikasi dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Data yang dimasukkan berupa *user name* dan *password* dilanjutkan dengan menekan tombol Masuk. Apabila kombinasi *user name* dan *password* tidak sesuai, maka akan ada kotak pesan yang mengatakan bahwa pengguna tidak berhak atas aplikasi.



Gambar 6 *Interface* Login

Proses login harus dilewati dulu, sehingga akan masuk ke tampilan utama aplikasi seperti terlihat pada Gambar 7. Tampilan utama aplikasi menyajikan dua bidang tampilan yang memiliki fungsi masing-masing. Bidang sisi kiri menampilkan menu pilihan dan bidang sisi kanan menampilkan informasi mengenai monitoring dari penggunaan anggaran.



Gambar 7 Tampilan Utama Aplikasi

3.1. Menu Aplikasi

Menu yang disajikan terdiri atas beberapa pilihan yaitu dashboard, data induk, transaksi, laporan (terinci dan tersaring). Menu ini bisa ditampilkan atau disembunyikan dengan cara

mengklik icon tanda garis tiga yang ada disebelah kiri tulisan Dashboard bagian atas. Jika menu disembunyikan, maka area tampilan data menjadi lebih luas.

3.2. Monitoring Aplikasi

Bagian ini merupakan bagian yang paling vital sesuai dengan tujuan dari aplikasi yaitu untuk melakukan monitoring dan evaluasi mengenai perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah. Data yang ditampilkan adalah data tahun terakhir, namun bisa diganti dengan tahun anggaran yang diinginkan. Ada tiga icon yang disajikan yaitu jumlah usulan, penerimaan dan tahap pelaporan. Apabila diklik pada masing-masing icon, maka akan disajikan informasi terkait bidang monitoringnya.

Icon Jumlah Usulan ditampilkan angka 40, itu berarti bahwa pada tahun 2020 ada sebanyak 40 usulan yang masuk. **Icon Penerimaan** ditampilkan angka 8/40 itu berarti pada tahun 2020 ada 8 usulan yang sudah diterima dari 40 usulan yang masuk. **Icon Tahap Pelaporan** ditampilkan angka 4/8 itu berarti pada tahun 2020 ada 4 mata anggaran yang sudah melaporkan dari 8 penerimaan.

3.3. Pengolahan Data

Pengolahan data ada dua yaitu pengolahan data induk dan pengolahan data transaksi. Pengolahan data induk menjadi bahan dasar untuk pengolahan data transaksi. Pengolahan data induk terdiri atas pengolahan data user, pengolahan data kelurahan, pengolahan data unit/kampung, pengolahan data perangkat daerah sektoral, pengolahan data tahun anggaran yang di dalamnya termasuk untuk melakukan proses batasan anggaran.

Pengolahan data transaksi terdiri atas tiga pilihan yaitu usulan anggaran, penerimaan anggaran dan pelaporan anggaran. Ketiga proses tersebut saling terkait, yaitu proses penerimaan tidak bisa dilakukan sebelum usulan anggaran dimasukkan. Begitu juga dengan proses pelaporan tidak bisa dilakukan jika proses penerimaan belum dicatatkan.

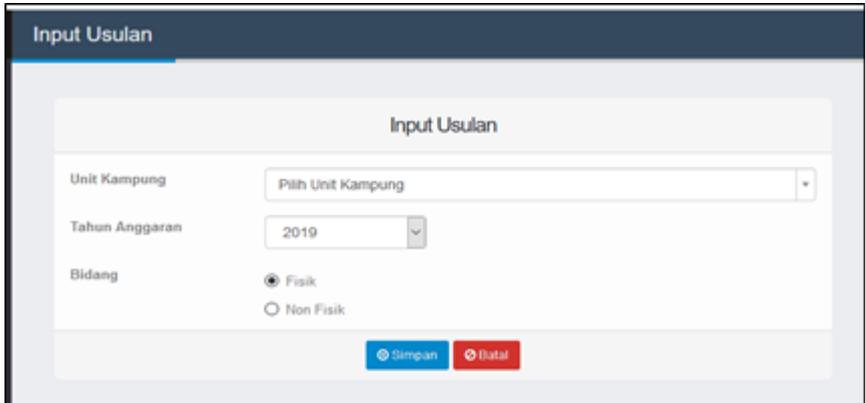
User interface usulan anggaran ini menjadi sangat penting karena merupakan gerbang utama transaksi yang ada pada sistem. Bagian ini merupakan proses master-detail sehingga perancangannya juga memerlukan pertimbangan khusus. Rancangan tampilan data usulan anggaran dapat dilihat pada Gambar 8. Pada tampilan ini dapat melakukan pengisian daftar usulan bidang (fisik atau non fisik) dan tahun anggaran. Jika data dengan batasan yang diisikan telah ada, maka langsung ditampilkan.

The screenshot shows the 'Daftar Usulan' (Proposal List) interface. At the top, there are filters for 'Bidang' (Physical) and 'Tahun' (2020). Below the filters is a '+ Tambah Usulan' button and a search bar. The main content is a table with the following data:

No	Nama Unit Kampung	Kelurahan	Bidang	Tahun	Usulan	Nilai	Action
1	Kelurahan Demangan	Kelurahan Demangan	Fisik	2020	6 Usulan	Rp. 108.500.000	[Checkmark] [Plus]
2	Kelurahan Kotabaru	Kelurahan Kotabaru	Fisik	2020	3 Usulan	Rp. 458.105.000	[Checkmark] [Plus]
3	Kampung Kepuh - Balapan	Kelurahan Klitren	Fisik	2020	5 Usulan	Rp. 35.500.000	[Checkmark] [Plus]
4	Kampung Iromejan	Kelurahan Klitren	Fisik	2020	4 Usulan	Rp. 17.000.000	[Checkmark] [Plus]

Gambar 8 Interface Tampilan Data Usulan Anggaran

Ada tiga aksi yang bisa dilakukan yaitu tambah usulan, input penerimaan dan lihat detail. Jika diklik menu tambah usulan akan masuk ke *interface* input usulan anggaran seperti terlihat pada Gambar 9. Jika diklik tombol lihat detail akan ditampilkan kotak dialog seperti terlihat pada Gambar 10.



Gambar 9 Interface Input Usulan Anggaran

Data Anggaran Kampung Kepuh - Balapan Bidang Fisik Tahun 2020

Data Anggaran Kampung Kepuh - Balapan Bidang Fisik Tahun 2020

+ Tambah Anggaran

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran	Sifat	Anggaran	Status	Action
1	Renovasi kantor RW 11	RW 11	15 m2	RW 11	Baru	Rp. 8.500.000	Laporan	[Detail]
2	Pengadaan papan informasi	RW 11/RT: 41, 45	2 unit	RT: 41, 45	Baru	Rp. 3.000.000	Laporan	[Detail]
3	Pembuatan SPAH	RW 12	4 unit	RW 12	Baru	Rp. 6.000.000	Terima	[Detail]
4	Pengadaan Papan Informasi	RW 12	4 unit	RW 12	Baru	Rp. 6.000.000	Pending	[Detail] [Cancel] [Delete]
5	Pengadaan Cermin Cembung	RW 12	6 titik	Pengguna Jalan	Baru	Rp. 12.000.000	Pending	[Detail] [Cancel] [Delete]

Total Anggaran : Rp. 35.500.000

Gambar 10 Interface Detail Usulan Anggaran

Berdasarkan *interface* pada Gambar 10, dapat dilakukan pengisian *input* data anggaran dengan cara mengklik menu tambah anggaran, sehingga akan ditampilkan *interface* seperti terlihat pada Gambar 11.

Input Anggaran

Input Anggaran

Data Usulan : Kelurahan Demangan (Kelurahan Demangan) Tahun 2020 Bidang Fisik

Nama Kegiatan:

Lokasi:

Volume:

Sasaran:

Manfaat:

Sifat: Baru Lanjutan

Skala:

Jumlah Uang:

Sumber Biaya:

Nama Perdase:

[Simpan] [Batal]

Gambar 11 Interface Input Data Usulan Anggaran

User interface untuk layanan penerimaan anggaran dapat dilihat seperti Gambar 12.

The screenshot shows a web interface titled "Input Penerimaan Anggaran Kampung Kepuh - Balapan Bidang Fisik". It features a table with the following data:

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Jml Terima	Catatan	Act
1	Pengadaan Papan Informasi	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	Catatan	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Pengadaan Cermin Cembung	Rp. 12.000.000	Rp. 12.000.000	Catatan	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom of the interface, there are two buttons: "Simpan" (Save) and "Batal" (Cancel).

Gambar 12 Interface Transaksi Penerimaan Anggaran

User interface transaksi pertanggungjawaban anggaran dapat dilihat pada Gambar 13.

The screenshot shows a web interface titled "Input Laporan Anggaran Kampung Kepuh - Balapan Bidang Fisik". It displays a form for entering budget details with the following fields:

- Nama Kegiatan:** Pembuatan SIPAH
- Manfaat:** Kesehatan lingkungan dan resapan air tanah
- Sifat:** Baru
- Jumlah Anggaran:** Rp. 6.000.000
- Sumber Biaya:** Kampung
- Tanggal Terima:** 06/06/2019
- Jumlah yang Diterima:** Rp. 6.000.000
- Jumlah Dana:** Rp. 6.000.000
- Dokumen:** Teksur... Tidak ada... ipah
- Keterangan:** Keterangan

At the bottom of the interface, there are two buttons: "Simpan" (Save) and "Batal" (Cancel).

Gambar 13 Interface Transaksi Pertanggungjawaban Anggaran

Sistem yang dihasilkan telah didemokan dan diberikan pelatihan kepada pihak pengurus kampung, pengurus LPMK dan Lurah Klitren. Setiap perwakilan aktor (admin, pengurus kampung/ketua RW, Ketua LPMK/Lurah) diberi kesempatan untuk menjalankan aplikasi mulai dari pengisian usulan, penerimaan anggaran sampai pelaporan anggaran sesuai hak akses masing-masing. Setelah menjalankan aplikasi, masing-masing diberikan isian berupa kuis untuk mendapatkan respon terkait sistem yang dihasilkan. Jumlah responden pengisi kuis ada sebanyak 23 orang yang terdiri atas staf kelurahan/admin 1 orang, pengurus kampung/ketua RW 18 orang, pengurus LPMK 3 orang dan Lurah 1 orang. Ada 5 pertanyaan yang diajukan (lihat tabel 1) dengan 4 pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS) dan Tidak Setuju (TS). Responden memberikan jawaban 18 SS, 4 S, 1 KS dan 0 TS untuk pertanyaan nomor 1. Responden memberikan jawaban 19 SS, 4 S, 0 KS dan 0 TS untuk pertanyaan nomor 2. Responden memberikan jawaban 16 SS, 6 S, 1 KS dan 0 TS untuk pertanyaan nomor 3. Responden memberikan jawaban 18 SS, 5 S, 0 KS dan 0 TS untuk pertanyaan nomor 4. Responden memberikan jawaban 16 SS, 6 S, 1 KS dan 0 TS untuk pertanyaan nomor 5. Hasil keseluruhan disajikan dalam bentuk persentase seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Tanggapan Pengguna Sistem

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS
1	Proses pengolahan usulan anggaran lebih mudah karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja	78%	17%	4%	0%
2	Proses rekapitulasi hasil musrenbang dapat dihasilkan lebih cepat	83%	17%	0%	0%
3	Monitoring dan evaluasi anggaran musrenbang dapat dipantau secara transparan	70%	26%	4%	0%
4	Ketersediaan informasi terkait usulan, penerimaan dan pelaporan anggaran lebih lengkap dan bervariasi	78%	22%	0%	0%
5	Pengurus Kampung, pengurus LPMK dan Lurah lebih mudah untuk pengambilan keputusan dengan penggunaan sistem ini	70%	26%	4%	0%

Berdasarkan data dari tabel 1, terlihat bahwa nilai positif respon dari pengguna (SS + S) adalah sebesar 96% dan nilai negative respon pengguna (KS + TS) hanya 4%. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem yang dihasilkan mampu mengatasi permasalahan yang ada selama ini.

4. KESIMPULAN

Pada akhir pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Telah dihasilkan sistem terintegrasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah berbasis kampung di kelurahan Klitren Yogyakarta yang mampu mengatasi permasalahan pengolahan data usulan anggaran dan pengendaliannya.
- Sistem yang dihasilkan dapat menyediakan kebutuhan informasi bagi pihak Pengurus Kampung, pengurus LPMK dan Kelurahan dalam pengelolaan perencanaan dan anggaran pembangunan wilayah dengan berbagai variasi sehingga memudahkan dalam membantu pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, M. (2016). Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi pada Gerakan Desa Membangun) *Jurnal RISALAH*, 27(2), 62-73.
- Hidayatullah, R. J., Wardani, N. H., & Rachmadi, A. (2018). Pengembangan Website Kampung Batik Jetis Dengan Metode Rational Unified Process. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2(11), 4347-4356.
- Husaini, M. (2016). Perencanaan Strategis Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi Di PT. Peksi Gunaraharja Divisi Pakan Ternak. *Jurnal Mikrotik*, 06(03), 1-22.
- Jamall, A. L., Anam, H., & Djirimu, M. A. (2016). Kajian Tentang Fungsi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Sippd) Dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Poso *e-Jurnal Katalogis*, 4(1), 60-67.
- Kurniawan, A. P., & Chazar, C. (2016). Perencanaan Cetak Biru Sistem Informasi Terintegrasi Berbasis E2AF Dan Metodologi EAP. *Jurnal Informasi*, VIII(1), 47-59.
- Muzaki, K., Yuliani, F., & Farida, L. (2017). Implementasi Kebijakan Program Alokasi Dana Kampung (ADK). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(3), 215-255.
- Puspitarini, D. W. (2018). Efektifitas Sistem Informasi Perencanaan Dan Keuangan Akrual (Sirka) Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 12(1), 92-105.
- Rozi, F., & Listiawan, T. (2017). Pengembangan Website Dan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Tulungagung *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika (JIPI)*, 02(02), 107-112.
- Sunardi, D., Utami, E., & Sudarmawan. (2017). Perencanaan Strategis Sistem Informasi Terintegrasi Pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu Untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif *Jurnal Informasi Interaktif*, 02(02), 137-145.